

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh net ekspor, investasi dan efektivitas belanja pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pada 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2015 hingga tahun 2020. Tinjauan pustaka atau landasan teori yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Pangestin, dkk (2021) meneliti tentang pengaruh investasi, net ekspor dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penelitian dilakukan dalam kurun waktu dua puluh tahun terakhir, dimulai pada tahun 2000 – 2019. Metode analisis yang digunakan adalah model Partial Adjustment Model (PAM) dengan data time series tahun 2000 – 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel investasi dan net ekspor secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sedangkan pengeluaran pemerintah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
2. Rizky Airy Putri, Zamzami dan Selamat Rahmadi (2021) meneliti tentang pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi sederhana dengan model data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi (Y_1) memilih metode Random Effect dan menarik kesimpulan bahwa Belanja Daerah (X) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi periode 2015 hingga 2018. Sedangkan variabel Tingkat Kemiskinan (Y_2) memilih Random Effect dan menarik kesimpulan bahwa Belanja Daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi periode 2015 hingga 2018.
3. (Agasisti et al., 2020) meneliti tentang pengaruh keuangan publik, pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi pada pemerintah daerah

di Italia. Metode yang digunakan adalah model panel dinamis dan metode momen. Temuan menunjukkan hubungan negatif yang cukup kuat antara pengeluaran pemerintah daerah saat ini dan pertumbuhan ekonomi. Investasi dalam anggaran modal ternyata tidak signifikan secara statistik bila diperhitungkan komposisi belanja publik. Kota-kota yang terletak di wilayah tengah-selatan justru menunjukkan efek pertumbuhan negatif dari belanja modal, yang menggarisbawahi pentingnya mengukur efisiensi belanja publik daripada hanya memperhatikan tingkat output absolut.

4. (Astuti, 2018) dalam penelitiannya melakukan analisis pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi (Studi pada 33 Provinsi di Indonesia). Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh investasi baik PMA dan PMDN, tenaga kerja, ekspor neto dan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode penelitian tahun 2012 hingga tahun 2016. Metode yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Penanaman Modal Asing (PMA), tenaga kerja, dan belanja pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan variable Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan ekspor neto tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
5. Purwanggono, dkk (2015) meneliti bagaimana pengaruh ekspor neto, tenaga kerja dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia dari tahun 1990 hingga tahun 2012. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis Ordinary Least Square. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, diketahui bahwa ekspor neto dan investasi mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
6. (Bojanic, 2013) meneliti bagaimana komposisi pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Bolivia melalui Metode Umum Momen atau Generalized Method of Moments (GMM). Hasil menunjukkan bahwa pengeluaran pertahanan, pengeluaran desentralisasi (lokal atau regional) merupakan cara terbaik bagi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan

negara. Pengeluaran pada bidang tambahan, seperti pendidikan, dan di departemen lain yang menjanjikan, memiliki potensi untuk menghasilkan pertumbuhan yang signifikan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1. Net Ekspor

2.2.1.1. Definisi Ekspor, Impor dan Net Ekspor

Menurut (Amir, 2009) ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari peredaran dalam masyarakat dan mengirimkan ke luar negeri sesuai ketentuan pemerintah dan mengharapkan pembayaran dalam valuta asing. Sedangkan, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tentang Kepabeanan, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean (Tahun 2006). Sedangkan pengertian impor menurut Undang-Undang Kepabeanan adalah kegiatan memasukan barang kedalam daerah pabean. Impor bisa diartikan sebagai kegiatan memasukan barang dari suatu negara (luar negeri) ke dalam wilayah pabean negara lain.

Menurut Marzuqi Yahya (2016;16) barang-barang dalam kegiatan ekspor, dikelompokkan sebagai berikut :

1. Barang yang diatur ekspornya, yaitu barang yang ekspornya hanya boleh dilakukan oleh eksportir terdaftar. Misalnya: kopi, tekstil , dan lembaran kayu.
2. Barang yang diawasi ekspornya, yaitu barang yang ekspornya hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri Industri dan Perdagangan. Misalnya: minyak, pupuk urea, limbah dan skrap.
3. Barang yang dilarang untuk ekspornya, yaitu barang yang tidak boleh diekspor. Misalnya ikan dalam keadaan hidup, benda cagar budaya, binatang alam dan tumbuhan alam.

Sementara itu, Net Ekspor atau ekspor bersih didefinisikan sebagai nilai barang dan jasa yang diekspor ke negara lain dikurang nilai barang dan jasa yang diimpor dari negara lain (Mankiw,

2006:27). Untuk mendapatkan ekspor bersih, kita harus mengurangi nilai ekspor ke nilai impor. Rumus net ekspor yaitu:

$$\text{Ekspor bersih} = \text{Nilai ekspor} - \text{Nilai impor}.$$

Nilai positif dari ekspor bersih (surplus perdagangan) berarti bahwa suatu negara adalah eksportir bersih untuk barang dan jasa. Surplus ini meningkatkan permintaan agregat dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB), sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Sebaliknya, nilai negatif ekspor neto (defisit perdagangan) berarti suatu negara adalah importir neto. Defisit ini mengurangi PDB dan mereduksi pertumbuhan ekonomi domestik.

2.2.1.2. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Net Ekspor

Menurut Eka Putra (2014) Net ekspor dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut:

a. Jumlah barang yang diproduksi.

Apabila nilai produksi meningkat maka net ekspor akan naik. Begitu juga sebaliknya, apabila nilai produksi menurun maka net ekspor juga akan turun. Hal ini berarti bahwa dengan besarnya jumlah barang yang di produksi maka akan menyebabkan berlakunya ekspor dan sebaliknya apabila jumlah barang yang di produksi sedikit maka akan terjadi impor dari luar negeri.

b. Nilai tukar rupiah/Kurs rupiah.

Terapresiasinya nilai tukar rupiah maka akan berdampak positif pada perdagangan luar negeri Indonesia. Temuan empiris ini menunjukkan bahwa terapresiasinya nilai tukar rupiah akan meningkatkan permintaan barang ekspor karena posisi rupiah yang terapresiasi menyebabkan harga barang-barang ekspor Indonesia menjadi lebih mahal di negara tujuan ekspor. Sehingga ekspor akan lebih besar dari pada impor, yang akhirnya net ekspor akan mengalami peningkatan. Begitu juga sebaliknya, apabila kurs mengalami depresiasi, maka harga barang ekspor di luar negeri akan semakin rendah atau murah dan harga barang impor akan menjadi lebih mahal.

Dengan demikian ekspor akan lebih kecil dari pada impor, sehingga net ekspor akan mengalami penurunan.

c. **Pertumbuhan Ekonomi**

Apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka net ekspor akan meningkat, dan sebaliknya apabila pertumbuhan ekonomi menurun maka net ekspor akan menurun. Hal ini dikarenakan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, maka produksi dalam negeri akan meningkat, dengan meningkatnya produksi dalam negeri akan menyebabkan ekspor juga semakin meningkat, sehingga net ekspor juga akan mengalami peningkatan.

2.2.2. Investasi Pemerintah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Investasi merupakan pengeluaran atau pengeluaran penanaman modal atau membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Pertambahan jumlah barang modal ini memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa dimasa yang akan datang (Sukirno, 2011). Sedangkan Menurut Jogiyanto (2010) pengertian investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan di dalam produksi yang efisien selama periode waktu yang tertentu.

Berdasarkan pertimbangan dari Undang – Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim

penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Penanaman modal yang dilakukan pemerintah, dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Investasi atau Penanaman Modal Asing (PMA)

Menurut UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007, penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

2. Investasi atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Menurut UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007, penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2008, Investasi pemerintah dikelompokkan menjadi dua yaitu, Pembelian Surat Berharga berupa pembelian saham dan pembelian surat utang dan Investasi Langsung berupa penyertaan modal dan pemberian pinjaman. Didalam Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, yang mengatur investasi pemerintah daerah pada pasal 116-119. Investasi pemerintah daerah dibagi menjadi dua kategori, investasi jangka pendek dan jangka panjang.

Investasi jangka pendek terdiri dari deposito berjangka waktu (tiga sampai dua belas bulan) dan dapat diperpanjang secara otomatis seperti pembelian SUN jangka pendek dan SBI. Sedangkan, investasi jangka panjang dibagi menjadi dua bagian yaitu investasi permanen dan investasi non-permanen. Investasi permanen adalah kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk pemanfaatan aset daerah, penyertaan

modal daerah pada BUMBD dan badan usaha lainnya atau investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Faktor – faktor yang menjadi tantangan dalam pertumbuhan investasi dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor-faktor internal yang dapat menghambat investasi di Indonesia antara lain:

- a. Terdapat gangguan keamanan di beberapa wilayah.
- b. Kurangnya kepastian hukum mengakibatkan permasalahan hak milik (property right) dan perjanjian usaha di Indonesia serta lemahnya penegakan hukum yang terkait dengan kinerja pengadilan niaga.
- c. Pasar tenaga kerja yang kurang kondusif di Indonesia.
- d. Terdapat tumpang tindih pada kebijakan pusat dan daerah serta ketidakjelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan di bidang Investasi, pemberian insentif dan perizinan.
- e. Prosedur yang terlalu berbelit dalam perijinan hingga kepabeanaan yang tidak hanya menyebabkan ekonomi biaya tinggi tetapi juga menghilangkan peluang usaha yang seharusnya dapat dimanfaatkan.
- f. Intensif investasi yang kurang, khususnya perpajakan.

Adapun faktor eksternal yang menghambat investasi antara lain:

- a. Penanaman modal asing (PMA) menurun akibat meningkatnya ketidakpastian global yang mempengaruhi rasa aman dalam kegiatan penanaman modal, adanya berbagai spekulasi dalam proses merger dan akuisisi perusahaan, dan masalah kelembagaan (kelambatan proses privatisasi di beberapa negara).
- b. Arus masuk PMA yang cenderung menurun tersebut, sebagian besar mengalir ke negara tertentu saja.

2.2.3. Definisi Efektivitas

Menurut Beni (2016: 69) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa

jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Menurut Mardiasmo (2017: 134) Efektivitas merupakan ukuran berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

2.2.4. Belanja Daerah

2.2.4.1. Definisi Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 pasal 49 ayat (5) belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

2.2.4.2. Klasifikasi Belanja Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 55 menunjukkan bahwa pengklasifikasian belanja daerah terdiri atas :

- a. Belanja Operasi, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
- b. Belanja Modal, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
- c. Belanja Tidak Terduga, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c merupakan pengeluaran atas beban APBD untuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- d. Belanja Transfer, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Klasifikasi belanja menurut jenisnya, dikelompokkan menjadi 2 yaitu, belanja tidak langsung dan belanja langsung. Menurut Soleh dan Rochmansjah (2010:42), belanja tidak langsung adalah belanja yang penganggarnya tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya usulan program atau kegiatan. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan setiap bulan dalam satu tahun anggaran sebagai konsekuensi dari kewajiban pemerintah daerah secara periodik kepada pegawai yang bersifat tetap (pembayaran gaji dan tunjangan) dan/atau kewajiban untuk pengeluaran belanja lainnya, yang umumnya diperlukan secara periodik. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Soleh dan Rochmansjah (2010:46) menyatakan bahwa belanja langsung adalah belanja yang penganggarnya dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Belanja langsung dianggarkan untuk setiap program atau kegiatan yang diusulkan.

Jumlah anggaran belanja langsung suatu program atau kegiatan dapat diukur atau dibandingkan secara langsung dengan output program atau kegiatan yang bersangkutan. Variabilitas jumlah setiap jenis belanja langsung dipengaruhi oleh target kinerja atau tingkat pencapaian yang diharapkan dari program atau kegiatan yang bersangkutan. Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

2.2.5. Pertumbuhan Ekonomi

2.2.5.1. Definisi Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Hasyim (2016:231) Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Ada tiga komponen dasar yang diperlukan dalam pertumbuhan ekonomi suatu bangsa; (1) Meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang; (2) Teknologi maju sebagai faktor utama yang menentukan drajat pertumbuhan dalam menyediakan aneka ragam barang kepada penduduknya; (3) Penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi, sehingga inovasi yang dihasilkan oleh IPTEK umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat.

Sedangkan menurut Prasetyo (2009) Pertumbuhan ekonomi (economic growth) secara paling sederhana dapat diartikan sebagai pertambahan output atau pertambahan pendapatan nasional agregat dalam kurun waktu tertentu, misalkan satu tahun. Perekonomian suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan jika balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya.

2.2.5.2. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Dengan adanya perbedaan pandangan mengenai pertumbuhan ekonomi, menghasilkan teori mengenai pertumbuhan ekonomi.

Secara umum, teori ini dibagi menjadi tiga jenis, yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik, neoklasik, dan historis. Sukirno (2006) mengemukakan beberapa ahli ekonomi yang menjelaskan sejumlah konsep pertumbuhan ekonomi yaitu sebagai berikut :

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Teori pertumbuhan ekonomi klasik adalah beberapa teori yang diungkapkan oleh para ekonom mengenai pertumbuhan ekonomi dari sudut pandang pertumbuhan penduduk. Jadi, teori ini didasarkan pada sedikit atau banyaknya penduduk di daerah tersebut. Salah satu ahli ekonomi yang merumuskan teori pertumbuhan ekonomi klasik, yaitu:

a. Adam Smith

Menurut Adam Smith, perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika ada pertumbuhan penduduk yang memperluas pasar dan mendorong spesialisasi. Sebagai contoh, negara X yang punya sedikit penduduk, dan negara Y yang punya banyak penduduk. Kebutuhan hidup masyarakat di negara X lebih sedikit, sehingga tidak menciptakan permintaan barang dan jasa yang banyak dan beragam di pasar. Hal ini akhirnya menyebabkan pekerjaan penduduk di negara X hanya seputar kebutuhan dasar. Lain dengan negara Y yang punya penduduk dengan jumlah jauh lebih banyak, kebutuhan penduduk yang lebih banyak menciptakan permintaan barang dan jasa yang lebih banyak dan beragam juga. Hal ini tentunya mendorong adanya diversifikasi dan spesialisasi peran, sehingga semakin banyak barang dan jasa yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Alhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara Y.

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik

Berbeda dengan teori sebelumnya, teori ini lebih memperhatikan hal lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selain pertumbuhan penduduk, seperti kewirausahaan dan investasi. Teori pertumbuhan ekonomi Neoklasik menjelaskan faktor

pertumbuhan ekonomi negara dapat stabil dengan tiga komponen penting yaitu tenaga kerja, modal dan teknologi. Salah satu ahli ekonomi yang merumuskan teori pertumbuhan ekonomi neo-klasik, yaitu:

a. Robert Solow

Menurut Solow, dalam jangka panjang tingkat tabungan dapat menentukan modal dalam proses produksi. Artinya, semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi pula modal dan output yang dihasilkan. Solow juga berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah rangkaian kegiatan dengan empat faktor utama yaitu manusia, akumulasi modal, teknologi modern dan hasil (output).

3. Teori Pertumbuhan Ekonomi Historis

Teori jenis ini berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi itu memiliki tahapan-tahapan tertentu. Jadi, untuk mencapai pertumbuhan yang maksimal, harus melewati tahapannya dari awal hingga akhir. Penjelasan dari salah satu ahli, yaitu:

a. Walt Whitman Rostow

Menurut Rostow, dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara akan mengalami tahapan-tahapan berikut:

- Tradisional, ekonomi didominasi sektor pertanian
- Transisi (pre take-off), terjadi perubahan struktur tenaga kerja dari pertanian ke industri
- Lepas Landas (take-off), ketika hambatan dalam struktur sosial dan politik dapat diatasi
- Menuju Kematangan (drive to maturity), serikat buruh dan dagang semakin maju
- Konsumsi Tinggi (high mass consumption), tenaga kerja didominasi tenaga kerja terdidik dan penduduk di kota lebih besar dari desa.

2.2.5.3. Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Menurut Pardede (2012) Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara ataupun daerah. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhannya atas dasar harga konstan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dan jasa dalam suatu wilayah, menerapkan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi. Semakin besar angka PDRB per kapita, semakin sejahtera penduduk suatu wilayah (Badan Pusat Statistik, 2022)

2.2.5.4. Konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut Badan Pusat Statistik (2022), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mempunyai beberapa konsep, antara lain sebagai berikut :

1) Wilayah Domestik dan Regional

Pengertian domestik/regional disini dapat merupakan Propinsi atau Daerah Kabupaten/Kota. Transaksi Ekonomi yang akan dihitung adalah transaksi yang terjadi di wilayah domestik suatu daerah tanpa memperhatikan apakah transaksi dilakukan oleh masyarakat (residen) dari daerah tersebut atau masyarakat lain (non-residen).

2) Produk Domestik

Semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan produk domestik daerah yang bersangkutan. Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan pendapatan domestik. Kenyataan

menunjukkan bahwa sebagian dari faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi di suatu daerah berasal dari daerah lain atau dari luar negeri, demikian juga sebaliknya faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk daerah tersebut ikut serta dalam proses produksi di daerah lain atau di luar negeri. Hal ini menyebabkan nilai produk domestik yang timbul di suatu daerah tidak sama dengan pendapatan yang diterima penduduk daerah tersebut. Dengan adanya arus pendapatan yang mengalir antar daerah ini (termasuk juga dari dan ke luar negeri) yang pada umumnya berupa upah/gaji, bunga, deviden dan keuntungan maka timbul perbedaan antara produk domestik dan produk regional.

3) Produk Regional

Produk regional merupakan produk domestik ditambah dengan pendapatan dari faktor produksi yang diterima dari luar daerah/negeri dikurangi dengan pendapatan dari faktor produksi yang dibayarkan ke luar daerah/negeri. Jadi produk regional merupakan produk yang ditimbulkan oleh faktor produksi yang dimiliki oleh residen.

4) Residen dan Non-Residen

Unit institusi yang mencakup penduduk/rumah tangga, perusahaan, pemerintah lembaga non-profit, dikatakan sebagai residen bila mempunyai/melakukan kegiatan ekonomi di suatu wilayah (Indonesia). Suatu rumah tangga, perusahaan, lembaga non profit tersebut mempunyai/melakukan kegiatan ekonomi di suatu wilayah jika memiliki tanah/bangunan atau melakukan kegiatan produksi di wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu (minimal satu tahun).

5) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Pasar

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi

(output) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar.

6) Produk Domestik Regional Neto (PDRN) Atas Dasar Harga Pasar

Perbedaan antara konsep neto di sini dan konsep bruto di atas, ialah karena pada konsep bruto di atas; penyusutan masih termasuk di dalamnya, sedangkan pada konsep neto ini komponen penyusutan telah dikeluarkan. Jadi Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar dikurangi penyusutan akan diperoleh Produk Domestik Regional Neto atas dasar harga pasar. Penyusutan yang dimaksud di sini ialah nilai susutnya (ausnya) barang-barang modal yang terjadi selama barang-barang modal tersebut ikut serta dalam proses produksi. Jika nilai susutnya barang-barang modal dari seluruh sektor ekonomi dijumlahkan, maka hasilnya merupakan penyusutan yang dimaksud di atas.

7) Produk Domestik Regional Neto (PDRN) Atas Dasar Biaya Faktor

Perbedaan antara konsep biaya faktor di sini dan konsep harga pasar di atas, ialah karena adanya pajak tidak langsung yang dipungut pemerintah dan subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada unit-unit produksi. Pajak tidak langsung ini meliputi pajak penjualan, bea ekspor dan impor, cukai dan lain-lain pajak, kecuali pajak pendapatan dan pajak perseorangan. Pajak tidak langsung dari unit-unit produksi dibebankan pada biaya produksi atau pada pembeli hingga langsung berakibat menaikkan harga barang.

Berlawanan dengan pajak tidak langsung yang berakibat menaikkan harga tadi, ialah subsidi yang diberikan pemerintah kepada unit-unit produksi, yang bisa mengakibatkan penurunan harga. Jadi pajak tidak langsung dan subsidi mempunyai pengaruh terhadap harga

barang-barang, hanya yang satu berpengaruh menaikkan sedang yang lain menurunkan harga, hingga kalau pajak tidak langsung dikurangi subsidi akan diperoleh pajak tidak langsung neto. Jika Produk Domestik Regional Neto atas dasar harga pasar dikurangi dengan pajak tidak langsung neto, maka hasilnya adalah Produk Domestik Regional Neto atas dasar biaya faktor.

8) Pendapatan Regional

Produk Domestik Regional Neto atas dasar biaya faktor merupakan jumlah balas jasa faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi disuatu daerah. Produk Domestik Regional Neto atas dasar biaya faktor, merupakan jumlah dari pendapatan yang berupa upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan yang timbul atau merupakan pendapatan yang berasal dari daerah tersebut. Akan tetapi pendapatan yang dihasilkan tadi, tidak seluruhnya menjadi pendapatan penduduk daerah itu, sebab ada sebagian pendapatan yang diterima oleh penduduk daerah lain, misalnya suatu perusahaan yang modalnya dimiliki oleh orang luar, tetapi perusahaan tadi beroperasi di daerah tersebut. Sebaliknya jika ada penduduk daerah yang menambahkan modalnya di luar daerah maka sebagian keuntungan perusahaan akan mengalir ke dalam daerah tersebut, dan menjadi pendapatan dari pemilik modal. Jika Produk Domestik Regional Neto atas dasar biaya faktor dikurangi dengan pendapatan yang mengalir ke luar dan ditambah dengan pendapatan yang mengalir ke dalam, maka hasilnya akan merupakan Produk Regional Neto yaitu merupakan jumlah pendapatan yang benar-benar diterima oleh seluruh yang tinggal di daerah yang dimaksud. Produk Regional Neto inilah yang merupakan Pendapatan Regional.

9) Pendapatan Regional Perkapita

Bila pendapatan regional ini dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu Pendapatan Perkapita.

2.2.5.5. Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut Badan Pusat Statistik (2022), untuk menghitung angka – angka PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu :

1. Menurut Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor) yaitu :

- a. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
- b. Pertambangan dan Penggalian
- c. Industri Pengolahan
- d. Listrik, Gas dan Air Bersih
- e. Konstruksi
- f. Perdagangan, Hotel dan Restoran
- g. Pengangkutan dan Komunikasi
- h. Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan
- i. Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah. Setiap sektor tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub sektor.

2. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor – faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

3. Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori, dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor). Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1. Hubungan Antara Net Ekspor terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Pangestin dkk (2021) Ekspor bisa menaikkan pengeluaran agregat penawaran dan permintaan juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Net ekspor memiliki pengaruh penting pada perekonomian karena ekspor menciptakan salah satu sumber devisa negara. Surplus perdagangan yang akan menaikkan GDP berjalan ketika nilai impor lebih rendah dari nilai ekspor, dan sebaliknya akan mengakibatkan menurunnya GDP apabila nilai impor. Menurut Karlita (2013), ekspor memiliki fungsi dalam memajukan pertumbuhan ekonomi. Apabila ekspor melonjak dibandingkan impor kemudian akan menaikkan pertumbuhan pendapatan nasional dan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi. Net ekspor merangsang meningkatnya pendapatan dan merangsang pertumbuhan ekonomi apabila jumlah ekspor lebih besar dari pada jumlah impor, sebaliknya apabila jumlah ekspor lebih kecil dari impor maka, net ekspor akan menurunkan pendapatan nasional (Purwanggono, 2015).

2.3.2. Hubungan Antara Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Harrod-Domar, dalam teorinya mengemukakan syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai

pertumbuhan yang tangguh atau steady growth dalam jangka panjang yaitu perlunya investasi (Murni, 2016). Investasi tersebut dapat berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Luar Negeri atau PMA (Kambono & Marpaung, 2020). Investasi asing memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang. Ini mempengaruhi skenario pekerjaan, produksi, harga, pendapatan, impor, ekspor, kesejahteraan umum negara penerima, dan neraca pembayaran dan berfungsi sebagai salah satu sumber penting pertumbuhan ekonomi (Hussain dan Haque, 2016).

Modal yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri akan membantu perekonomian suatu negara. Investasi dalam negeri atau yang juga dikenal dengan nama Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dianggap mampu mendorong perekonomian suatu negara berkembang dengan sangat baik, dimana jika investasi yang terjadi di dalam negeri mengalami peningkatan maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Jufriada, 2016).

2.3.3. Hubungan Antara Efektivitas Belanja Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

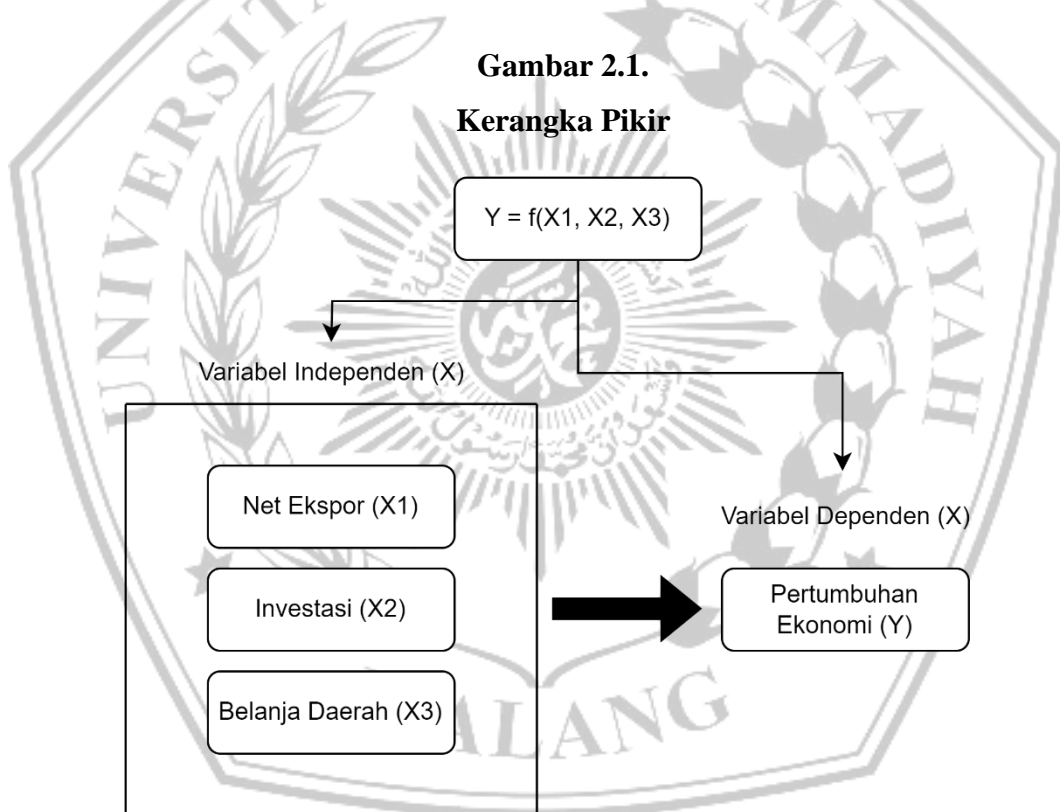
Menurut Sendow, Koleangan dan Rotinsulu (2018), pengeluaran daerah atau belanja daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam memajukan ekonomi daerah, terutama untuk daerah-daerah berkembang, tentu saja, alokasi dari anggaran pemerintah menjadi syarat yang tidak dapat disangkal di mana pemerintah sebagai pemegang anggaran harus terus meningkatkan ekonomi yang ada untuk mencapai kemakmuran bagi komunitas yang mereka wakili.

Selanjutnya, (Bojanic, 2013) mengemukakan bahwa perlunya meningkatkan produktivitas semua jenis pengeluaran pemerintah, karena produktivitas inilah yang pada akhirnya menentukan arah di mana berbagai jenis pemerintahan pengeluaran mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Menurut Putri, Zamzami dan Rahmadi (2021), semakin tinggi alokasi belanja daerah pada APBD menyebabkan semakin tinggi tingkat

pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mengurangi atau mengentaskan tingkat kemiskinan.

2.4 Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah gambaran tentang keterkaitan antara variabel penelitian yang akan dikaji oleh peneliti untuk memecahkan masalah demi tercapainya tujuan penelitian. Penelitian ini terdiri dari satu variabel independen (bebas) yaitu Belanja Daerah dan satu variabel dependen (terikat) yaitu Pertumbuhan Ekonomi. Untuk lebih memperjelas hubungan antara variabel penelitian, maka digambarkan kerangka pikir sebagai berikut:



Keterangan :

—————> = Parsial

2.5 Pengajuan Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Karena sifatnya masih sementara, maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui data empirik yang terkumpul. Berdasarkan landasan teoritis dan kerangka pikir yang telah dikemukakan, maka hipotesis penelitian yang dapat dirumuskan yaitu:

- a. H₁: Net ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
- b. H₁: Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
- c. H₁: Efektivitas belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

